

Evaluasi Program Kartu Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Miskin

(Studi Kasus di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo)

Yusran Yusuf ^{1*}, Bakri Bakri ², Erna Erna ³, Iwan Mamminanga ⁴

¹⁻⁴ Universitas Puangrimaggalatung, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Puangrimaggalatung, Maddukelleng, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: uniprima@gmail.com*

Abstract. This study aims to determine the benefits of the farmer card program in improving the welfare of poor farmers in Talotenreng Village at the BPP Sabbangparu of the Wajo Regency Agriculture and Food Security Office and to find out the factors that hinder the evaluation of the farmer card program in improving the welfare of poor farmers in Talotenreng Village at the BPP Sabbangparu of the Wajo Regency Agriculture and Food Security Office. The research method used is a qualitative method, usually the data is inductive or qualitative, and the type of research used is descriptive that provides a detailed picture or phenomenon. The results of this study show that the Farmer Card Program in Talotenreng Village has not been used by farmers as recipients of farmer cards or is still tentative so that farmers cannot feel the benefits, because there are no instructions, directions or orders from the Central Government/Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The Farmer Card Program is the latest Government program implemented in all regions with the aim of redeeming the purchase of subsidized fertilizers in an effort to improve the welfare of farmers in accordance with Presidential Regulation No. 77 of 2005 concerning the Determination of Subsidized Fertilizers as Goods in Supervision as amended by Presidential Regulation No. 15 of 2011 concerning Changes in the Determination of Subsidized Fertilizers as Goods Under Supervision.

Keywords: Evaluation, Farmer Card Program, Central Government

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat evaluasi program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, biasanya datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memberikan gambaran atau fenomena secara rinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Tani di Kelurahan Talotenreng belum di pergunakan oleh petani sebagai penerima kartu tani atau masih bersifat Tentatif sehingga petani belum bisa merasakan manfaatnya, karena belum ada petunjuk, arahan atau perintah dari Pemerintah Pusat/Kementerian Pertanian RI. Program Kartu Tani adalah program Pemerintahan terbaru yang diterapkan di seluruh daerah dengan tujuan untuk menebus pembelian pupuk bersubsidi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sesuai dengan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Kartu Tani, Pemerintah Pusat

1. LATAR BELAKANG

Siklus kemiskinan masih menjadi penyakit kronis terutama di negara-negara berkembang, salah satunya adalah angka kemiskinan petani Indonesia. Negara ini kaya akan sumber daya alam dan mempunyai wilayah daratan yang sangat luas. Faktanya, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, sehingga pertanian mempunyai nilai produksi yang lebih tinggi dibandingkan industri lainnya.

Kementerian Pertanian melihat besarnya potensi yang dimiliki sektor pertanian dan membuat program terbaru pemerintah di bidang pertanian yaitu Kartu Tani yang diterbitkan pada masa pemerintahan Bapak Ir. H. Joko Widodo khususnya pada tahun 2016. Penyelenggaraan Program Kartu Tani dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 dari Pulau Jawa hingga Program Kartu Tani tersebut sampai ke Pulau Sulawesi Selatan khususnya di wilayah Kabupaten Wajo mulai pada tahun 2022 hingga saat ini.

Dengan diterbitkannya program kartu tani, tujuannya adalah untuk meningkatkan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani sejalan dengan tujuan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin. Tujuan dari Kartu Tani ini adalah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang tepat sasaran berdasarkan enam prinsip yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat harga. Kartu Tani merupakan upaya pelaksanaan penyaluran, pengawasan dan pengendalian pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak. Pemberian pupuk bersubsidi digunakan untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan lingkungan pertanian. Kartu Tani dirancang untuk meningkatkan layanan perbankan bagi kelompok tani.

Kartu tani juga merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Pertanian yang awalnya bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) akan tetapi kerja sama tersebut gagal pada tahun 2020-2021. Salah satu Bank milik Negara yang menyatakan kesediaannya untuk mendukung program pemerintah yang ditujukan kepada petani yang berada di Kelurahan Talotenreng, Kabupaten Wajo ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Oleh sebab itu sangatlah diperlukan adanya evaluasi yang besar terhadap Program Kartu Tani agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani miskin termaksud wilayah Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. Namun, seperti program Pemerintah lainnya, terdapat berbagai masalah potensial yang mungkin dapat terjadi dalam implementasi program kartu tani ialah, pertama yaitu pemilihan penerima yang tidak tepat apabila proses pemilihan penerima kartu tani tidak dilakukan dengan baik maka bantuan tersebut mungkin tidak akan sampai kepada petani yang membutuhkannya atau bahkan dapat sampai kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria. Kedua yaitu keterbatasan anggaran apabila jumlah anggaran terbatas dapat membatasi jumlah petani yang dapat menerima kartu tani dan bantuan yang diberikan. Hal ini dapat menyulitkan bagi petani yang membutuhkan bantuan tetapi tidak dapat menerimanya karena keterbatasan anggaran. Ketiga yaitu distribusi yang tidak merata apabila adanya ketidakmerataan dalam distribusi kartu tani dan bantuan dapat menyebabkan ketidakadilan serta ketidakpuasan dikalangan petani. Keempat yaitu ketidakcocokan dengan kebutuhan lokal bahwa program kartu tani yang

dirancang secara umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus di setiap daerah dapat menyebabkan ketidakcocokan dengan kondisi setempat. Kelima yaitu kurangnya pemantauan dan evaluasi apabila tidak adanya pemantauan dan evaluasi yang tepat terhadap program kartu tani, sulit untuk menilai sejauh mana program tersebut efektif dan apakah tujuan program tercapai. Keenam yaitu ketergantungan jangka panjang bahwa program kartu tani yang tidak didukung dengan upaya peningkatan kemandirian petani dapat menyebabkan ketergantungan jangka panjang pada bantuan Pemerintah.

Maka dari itu untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut bahwa bagi Pemerintah atau instansi yang terlibat dalam program kartu tani sangatlah penting untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian secara berkala. Serta melibatkan para pemangku kepentingan seperti Kelompok Tani dalam proses perencanaan dan implementasi yang dapat membantu mengidentifikasi masalah dan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Evaluasi Program Kartu Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Miskin (Studi Kasus di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat evaluasi program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Evaluasi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata evaluasi adalah penilaian. Dari segi bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris “Evaluation” yang berarti penilaian. Secara umum, evaluasi adalah proses menilai, mengukur, memperbaiki serta meningkatkan suatu kegiatan dengan cara membandingkan proses perencanaan dengan hasil yang dicapai.

Evaluasi ialah proses penilaian yang memberikan informasi tentang bagaimana kegiatan yang sedang dilaksanakan, bagaimana penyelesaiannya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk melihat apakah ada perbedaan diantara keduanya, dan bagaimana manfaat yang telah diselesaikan dibandingkan dengan manfaat yang telah dicapai informasi tentang risiko yang akan ditimbulkan (Umar, 2005).

Menurut Zainal Arifin (1991:1), ada dua hal mendasar yang harus dipertimbangkan dalam penilaian :

1. Evaluasi untuk menentukan nilai sesuatu.
2. Berdasarkan dari perolehan nilai, dapat merujuk pada suatu kualitas, apakah mempunyai nilai atau tidak.
3. Evaluasi untuk suatu tindakan.
4. Langkah yang diambil seorang evaluator dalam suatu peristiwa atau kebijakan yaitu memberikan makna terhadap peristiwa tersebut, agar dapat diolah lebih lanjut. Tindakan semacam itu didasarkan pada objektivitas dan integritas bahwa hasilnya akan memuaskan semua pihak.

Menurut berbagai interpretasi penilaian yang disajikan, maka evaluasi adalah suatu proses dalam menilai tindakan yang dilakukan untuk dapat memberikan penilaian bahwa layak atau tidaknya pegawai diberikan apresiasi atas pencapaiannya dalam pekerjaan, baik untuk kepemimpinan dan bawahannya yang dapat dirasakan di semua bidang pekerjaan yang ada di setiap lembaga.

Pengertian Program Kartu Tani

Secara umum, program didefinisikan sebagai jenis proyek akan dilaksanakan. Arikuntoro juga menjelaskan tiga konsep penting yang harus dipahami untuk menentukan program antara lain :

- a. Realisasi atau menerapkan suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu yang relatif lama, tidak dalam bentuk tunggal, melainkan dalam bentuk jamak berkelanjutan.
- c. Terjadi pada organisasi dengan sekelompok orang.

Kartu Tani merupakan program baru Pemerintah yang diterapkan di berbagai wilayah dengan tujuan untuk membeli dan menebus pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani berdasarkan dengan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani yang mencakup sarana produksi pertanian, khususnya pupuk bersubsidi yang disusun sekali dalam satu tahun berdasarkan dengan musyawarah keanggotaan kelompok tani dan kemudian digunakan sebagai sarana memesan atau penebusan kepada pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya yang ditetapkan melalui sistem e-RDKK.

Pengertian Kesejahteraan

Secara teoritis diakui bahwa bentuk keluarga kecil lebih yakin akan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dibandingkan dengan keluarga besar, tetapi juga dapat disamakan antara keluarga kecil dan keluarga besar karena ada perbedaan pandangan atau pendapat tentang kriteria kesehatan keluarga yang sama. Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dimana seluruh kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial terpenuhi. Hal ini juga memungkinkan keluarga untuk hidup harmonis dengan lingkungannya dan membesarkan anak-anak yang dapat tumbuh dan terlindungi oleh lingkungan yang stabil dan sehat. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mental dan sikap pribadi merupakan hal yang penting (BKKBN, 2011).

Kesejahteraan mengacu pada semua kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup penduduk berdasarkan konteks sosial. Dimana mencakup unsur pelayanan dan kebijakan di ranah eksternal yang berkaitan banyak aspek kehidupan masyarakat umum, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, reaksi, adat istiadat keagamaan, dan lain-lainnya (Rukminto, 2003).

Pada dunia modern ini, konsep kesejahteraan mengacu pada kemampuan seseorang untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar, seperti pangan, papan, pekerjaan, bahkan waktu luang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan ikatan sosial dengan orang-orang di negara lain.

Berdasarkan pemahaman di atas, bahwa kesejahteraan mendorong setiap upaya untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, baik itu kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, udara bersih, dan kebutuhan lainnya maupun dalam berbagai bidang seperti fisik, mental, , kesejahteraan emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual.

Pengertian Petani Miskin

Kesejahteraan masyarakat pedesaan menurun. Pemilik tanah berkurang karena populasi meningkat dengan cepat, dua penyebab utama kemiskinan itu sendiri. Petani merupakan aset yang mempunyai kekuatan besar dalam mensejahterakan masyarakat. Tanpa bantuan petani, masyarakat sulit bertahan hidup karena peran petani penting untuk kelangsungan hidupnya. Padahal, mereka merupakan masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah bertani.

Petani secara luas diartikan sebagai segala kegiatan usaha yang melibatkan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti disebutkan sebelumnya, bertani dipahami sebagai bentuk pemanfaatan lahan tiap jenis musim tanaman tertentu. Menurut Wahyudi (2005:39), ada beberapa kelompok petani yang terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Petani Kaya, yaitu petani yang mempunyai lahan pertanian lebih dari 2,5 Hektar.
- b. Petani Sedang adalah petani yang mempunyai lahan pertanian seluas 1-2,5 Hektar.
- c. Petani Miskin adalah petani yang luas lahan pertaniannya kurang dari 1 Ha.

Sampai saat ini, ada dua definisi kemiskinan, yang pertama adalah kemiskinan relatif, yang didasarkan pada persentase pendapatan nasional suatu kelompok penduduk tertentu. Kedua, kemiskinan absolut menunjukkan seberapa banyak kebutuhan dasar atau konsumsi aktual yang terpenuhi atau tidak, termasuk pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan menurut Sajogyo, kemiskinan adalah suatu taraf hidup yang berada di bawah standar hidup minimum yang ditentukan oleh kebutuhan pangan pokok sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berkecukupan berdasarkan kebutuhan dasar dan gizi.

Program Kartu Tani merupakan program terbaru Pemerintah untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Program Kartu tani dikeluarkan secara bertahap pada masa Pemerintahan Bapak Ir. H. Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2016, hingga program tersebut telah sampai di daerah Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo sejak tahun 2022 hingga sekarang.

William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini, evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas serta dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Maka dari itu, William N. Dunn mengemukakan enam Kriteria Evaluasi Kebijakan Program Kartu Tani yaitu : (a.) Efektivitas, (b.) Efisiensi, (c.) Kecukupan, (d.) Perataan, (e.) Responsivitas, dan (f.) Ketepatan.

1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengkaji kondisi alami suatu daerah, di mana peneliti memberikan gambaran umum dan deskriptif berdasarkan data di lapangan. metode penelitian ini adalah data yang dikumpulkan tidak berasal dari kusioner tetapi hasil wawancara, observasi langsung dan dokumen formal yang lebih akurat. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang evaluasi *Program Kartu Tani* dalam meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan institusi pertanian terdepan di tingkat wilayah Kecamatan. Setiap BPP terbagi dalam beberapa wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian. Kantor BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berada di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Kantor BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo terdapat beberapa tenaga kerja diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 9 orang, P3K 5 orang, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Swadaya 2 orang. Terdapat juga Kelompok Tani (POKTAN) 344 orang, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) 15 orang dan Pengecer Pupuk Bersubsidi berjumlah 4 kios (Toko HS dan UD. Sejahtera berlokasi di Kelurahan Talotenreng, Dahlia Agribisnis dan CP. Rahayu Hadiwiguna berlokasi di Kelurahan Sompe). Luas wilayah kerja 132,75 Km² BPP Sabbangparu terdiri dari 3 Kelurahan dan 12 Desa.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini efektivitas dapat memberikan sebuah gambaran pemahaman program kartu tani di kalangan penerima kartu tani. Pemahaman program dapat dilihat dari sejauh mana kelompok tani, pemerintah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sabbangparu dan Pengecer/Kios Pupuk Bersubsidi sudah dapat memahami kegiatan program kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sabbangparu. Keberhasilan sebuah program kartu tani ditentukan dari intensnya sosialisasi maupun pembinaan yang dilakukan oleh pihak BPP serta PPL yang ditunjuk kepada Petani dan Pengecer pupuk bersubsidi sebagai tim koordinasi jalannya sebuah kegiatan program kartu tani di Kecamatan Sabbangparu, dalam melihat suatu pemahaman program yang sama dari pengetahuan atau informasi yang disampaikan kepada pihak terkait yaitu sebagai berikut : Hal yang di ketahui tentang program kartu tani, Latar Belakang Adanya Kartu Tani, Tujuan dari terbentuknya program kartu tani.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan secara maksimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini, bahwa efisiensi dapat memberikan sebuah gambaran mengenai proses sosialisasi atau alur transaksi dalam penggunaan kartu tani.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah mengukur ketersediaan permasalahan dari hasil yang diperoleh peneliti berdasarkan dari hasil wawancara informan dengan observasi lapangan. Dalam hal ini, bahwa kecukupan dapat memberikan sebuah gambaran terkait tentang siapa saja yang berhak menerima program kartu tani baik itu Petani, Kelompok Tani, ataupun harus sesuai dengan jumlah lahan maksimal 2 Ha maupun waktu yang diperlukan dalam penyaluran pupuk.

4. Perataan

Pemerataan dapat dikatakan sebagai ukuran pemerataan manfaat program kartu tani yang selama ini dirasakan oleh sebagian petani ketika menggunakan kartu tani. Perataan dapat memberikan sebuah gambaran terkait dengan pengalokasian pupuk kepada petani penerima kartu tani dan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kartu tani.

5. Responsivitas

Daya tanggap adalah mengukur pencapaian kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu melalui kemampuan pemerintah dalam menunjukkan konsistensi program dan kegiatan serta mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini, bahwa responsivitas dapat memberikan sebuah gambaran tentang dampak yang dirasakan oleh penerima kartu tani maupun kelebihanannya dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

6. Ketepatan

Ketepatan mengacu pada kesesuaian ukuran hasil dan manfaat yang berdasar dari wawancara serta observasi dalam pelaksanaan program kartu tani di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini, ketepatan dapat memberikan sebuah gambaran tentang hasil dari adanya program kartu tani.

Pembahasan Penelitian

Data diperoleh dari hasil kajian evaluasi Program Kartu Tani dalam meningkatkan kesejahteraan miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam penelitian ini kalimat deskriptif lebih dominan, merupakan hasil wawancara penelitian dengan informan yang menjadi narasumber utama peneliti, serta observasi langsung peneliti di lokasi penelitian. Hasil wawancara dicatat dalam kertas pedoman wawancara yang peneliti siapkan. Selain hasil wawancara peneliti juga melakukan observasi sesuai dengan fenomena yang benar terjadi dan menerima dokumen dari Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sabbangparu. Berikut rekapan data penyaluran kartu tani di

Kecamatan Sabbangparu yaitu ± 5460 kartu yang telah disalurkan dan yang belum disalurkan kepada Petani sebagai penerima kartu tani ± 1400 kartu.

Pada penelitian Evaluasi Program Kartu Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini menggunakan teori William N. Dunn 2018:63 sebagai kebijakan program kartu tani dalam penelitian ini yaitu:

a. Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman merupakan langkah awal dalam membahas keefektifan pihak yang terlibat dalam implementasi kartu tani, dimana mereka akan mengetahui betul apa, apa maksud dan tujuan dari kebijakan kartu tani yang tepat, yang seringkali sangat erat kaitannya dengan tujuan atau sasaran maupun yang melatar belakangi terbentuknya program kartu tani. Pemerintah melaksanakan Program Kartu Tani di semua tingkatan dengan pihak-pihak terkait seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sabbangparu, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Sabbangparu, Kepala Kelurahan Talotenreng, Kepala Unit BRI Sabbangparu, Ketua Kelompok Tani beserta anggotanya, dan Pengecer/Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sabbangparu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, informan tahu apa itu program kartu tani. Dari hasil wawancara dengan para informan, mereka tahu satu hal, yaitu bahwa kartu tani merupakan kartu yang akan digunakan untuk membeli atau menebus pupuk subsidi yang tersedia. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua kepada informan mengenai hal yang melatar belangi terbentuknya program kartu tani bahwa informan mengetahui penyebab latar belakang dari program kartu tani yakni sering muncul isu yang menyatakan pupuk tidak tersedia atau langka. Sehingga Petani mengharapkan dengan adanya kartu tani ini tidak akan muncul lagi isu bahwa pupuk tidak tersedia di Kios Pengecer (Pupuk Langka). Maka untuk mengantisipasi hal tersebut segera diberlakukan kartu tani agar Petani dapat menerima pupuk sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan data RDKK.

Untuk pertanyaan ketiga kepada informan mengenai tujuan dari terbentuknya program kartu tani, informan mengetahui tujuan terbentuknya kartu tani yakni mempermudah Petani dalam melakukan penebusan dan pembelian pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan melalui e-RDKK. Serta terwujudnya pendistribusian pupuk dengan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga agar tidak terjadi kecurangan maupun kelangkaan pupuk subsidi. Hanya sayangnya kartu tani tersebut belum dipergunakan oleh Petani. Maka dari itu, harapan Petani dan Pengecer di

Kecamatan Sabbangparu supaya kartu tani segera diberlakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani tepat sasaran.

b. Efisiensi

Memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sumber daya berupa tenaga, dana dan waktu yang digunakan dalam suatu usaha atau proses, maka akan dikatakan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, informan tahu alur transaksi dalam penggunaan kartu tani. Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa petani tergabung dalam Poktan sekaligus terdaftar di aplikasi RDKK, jika data petani yang sudah di verifikasi atau di setujui dan dinyatakan valid, maka akan segera dibuatkan kartu oleh pihak penyeilia atau pembuat kartu tani yaitu BRI, kemudian kartu tani tersebut akan diserahkan kepada Petani melalui perantara penyuluh. Akan tetapi kartu tani ini belum aktif dan belum bisa dipergunakan oleh Petani. Karena belum ada petunjuk/perintah dari Pusat/Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo sampai di Kecamatan/ Kelurahan/Desa dan Kelompok Tani serta anggotanya.

Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua kepada informan mengenai proses sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah mengenai program kartu tani bahwa informan mengetahui tentang proses sosialisasi oleh Pemerintah mengenai program kartu tani yakni Penyuluh Pertanian melakukan pertemuan sosialisasi di tingkat kelompok tani di masing-masing Desa/Kelurahan yang di dampingi Aparat Pemerintah yang terkait.

c. Kecukupan

Kecukupan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan maupun papan. Dalam memenuhi kecukupan tentunya memerlukan sumber daya manusia dan waktu agar dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, maka informan tahu siapa saja yang berhak sebagai penerima kartu tani. Dalam wawancara dengan informan, mereka tahu hal terpenting dalam pertanyaan 1-3, yaitu yang berhak sebagai penerima kartu tani yaitu Petani yang tergabung dalam kelompok tani, mempunyai lahan maksimal 2 Hektar sesuai dengan usulan di aplikasi RDKK yang datanya dinyatakan valid, sehingga tidak ada lagi Petani yang tidak menerima pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat kepada informan mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bahwa informan mengetahui tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi diberikan kepada Petani berdasarkan e-RDKK yang dibagi menjadi 2 musim tanam setiap tahun yaitu MT 1 dan MT 2. Penggunaan kartu

tani ini masih bersifat tentatif atau suatu kegiatan yang belum selesai, belum dimulai, atau masih dalam proses pembahasan.

d. Perataan

Perataan atau pemerataan yaitu pembagian yang adil atau merata terhadap pengalokasian distribusi akan manfaat dari program kartu tani yang akan dirasakan oleh penerima atau pengguna kartu tani.

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan sebelumnya, para informan tahu cara pengalokasian pupuk kepada petani yang telah memenuhi kategori penerima kartu tani. Dalam wawancara dengan informan, mereka tahu hal terpenting dalam pengalokasian pupuk kepada Petani yaitu kuota yang diterima Petani dihitung berdasarkan kuota tiap Kabupaten/ Kecamatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian Pertanian sesuai luas lahan Petani yang terdaftar maksimal 2 Ha.

Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua kepada informan mengenai apa yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kartu tani bahwa informan mengetahui yang menjadi kendala dalam program kartu tani yaitu adanya perpindahan pengelola kartu tani yang pertama dari Bank BNI ke Bank BRI yang administrasinya diulang dari awal. Masih ditemukannya beberapa Petani yang belum terdaftar di aplikasi RDKK, oleh sebab itu kelompok tani, dan aparat terkait perlu mendapat petunjuk teknis secara tertulis untuk dipedomani dan dilaksanakan khususnya petani sebagai penerima kartu tani.

e. Responsivitas

Responsivitas adalah kepekaan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai keluhan dan kebutuhan dari Petani sebagai penerima kartu tani. Responsivitas sama juga halnya dengan bagaimana respon para Petani terhadap adanya program kartu tani yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Maka dari itu, berdasarkan temuan penelitian yang disampaikan, maka informan tahu dampak yang dirasakan Bapak/Ibu setelah adanya Program Kartu Tani. Dalam wawancara dengan para informan, mereka tahu hal-hal penting mengenai dampak setelah adanya program kartu tani, yaitu kemampuan memahami tujuan dan manfaat dari program kartu tani, serta dapat mengenal Petani lebih dekat ketika penyaluran kartu tani, namun penggunaan kartu tani ini masih bersifat tentatif atau suatu kegiatan yang belum selesai, belum dimulai, atau masih dalam proses pembahasan.

Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua kepada informan mengenai apakah kelebihan dari penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi bahwa informan

mengetahui yang menjadi suatu kelebihan dari penggunaan kartu tani saat penyaluran pupuk bersubsidi yaitu mereka belum mengetahui kelebihan dari penggunaan kartu tani karena program tersebut belum berjalan atau digunakan.

f. Ketepatan

Ketepatan sama halnya dengan kemampuan seseorang dalam memberikan suatu arahan untuk mencapai sasaran antara hasil dan manfaat sesuai dengan informasi yang didapatkan dari informan secara langsung. Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, para informan mengetahui apakah adanya kartu tani dapat meningkatkan kesejahteraan petani miskin. Dalam wawancara dengan para informan, mereka tahu hal-hal penting terkait dengan adanya kartu tani dapat meningkatkan kesejahteraan petani yakni mereka belum bisa memastikannya dikarenakan kartu tani pasalnya tidak didasarkan pada miskin atau kayanya seseorang, akan tetapi kartu tani diperuntukkan bagi Petani yang mengelola lahan, sudah terdaftar dalam kelompok dan di aplikasi RDKK.

Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua kepada informan mengenai apakah dengan adanya kartu tani semakin mempermudah Petani dalam pengambilan pupuk atau justru sebaliknya. Pada sesi wawancara dengan informan, adanya kartu petani ini sulit dilakukan bagi Petani Lansia dan mudah dilakukan bagi Petani Milenial saat pengambilan/penebusan pupuk, bahkan Petani tidak perlu repot lagi menyiapkan atau membawa berkas berupa fotocopy KTP dan lain-lain, hanya cukup membawa kartu tani dan tentunya disaat kartu tani tersebut telah bisa dipergunakan.

Kemudian, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas mengenai faktor penghambat dari adanya program kartu tani bahwa Petani di Kelurahan Talotenreng Kecamatan Sabbangparu belum merasakan akan adanya faktor penghambat dari kartu tani baik itu kesulitan dalam pemahaman dan penggunaan kartu tani, alur pelayanan distributor transaksi penebusan pupuk, dan lain-lainnya dikarenakan kartu tani ini belum dipergunakan oleh Petani.

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang evaluasi program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi peneliti dalam pelaksanaan penelitian yaitu:

1. Adanya perpindahan pengelola kartu tani dari Bank BNI ke Bank BRI yang administrasinya diulang dari awal.
2. Kartu tani di Kelurahan Talotenreng masih dalam proses penyaluran atau masih bersifat tentatif.

3. Oleh karena itu, peneliti sangat sulit mendapatkan hasil dari penelitian tersebut dikarenakan kartu tani ini masih belum diberlakukan sehingga para penerima kartu tani yang telah tergabung dalam kelompok tani belum bisa merasakan akan pemanfaatan kartu tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari temuan penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan secara rinci pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa evaluasi Program Kartu Tani dapat dilihat dari pada Teori Kebijakan Program Kartu Tani William N. Dunn 2018:63 yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas Dan Ketepatan.

Selanjutnya, hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan evaluasi program kartu tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo bahwa setelah peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan ternyata di Kecamatan Sabbangparu kartu tani tersebut secara umum belum digunakan atau belum diperaktekkan karena belum ada petunjuk, arahan atau perintah dari Pemerintah Pusat/Kementerian Pertanian RI. Oleh sebabnya itu, untuk saat ini belum ada kejelasan akan pemanfaatan penggunaan kartu tani. Akan tetapi kartu tani tersebut masih dalam proses penyaluran untuk segera diberikan kepada petani penerima kartu tani dalam hal ini masih bersifat Tentatif.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian tentang evaluasi program kartu tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin di Kelurahan Talotenreng pada BPP Sabbangparu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo yaitu penyaluran kartu tani agar kiranya dipercepat diberikan pada para petani penerima kartu tani dan segera digunakan agar mereka dapat merasakan akan manfaat dari program kartu petani yang diberikan oleh Pemerintah.

Saran yang diberikan oleh peneliti kepada Petani di Kecamatan Sabbangparu terkhususnya di Kelurahan Talotenreng untuk membantu Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan apabila pendataan luas lahan yang dimiliki dilaporkan secara jujur tanpa melebihkan atau pengurangan dengan melampirkan bukti fisik Foto Copy KTP, Pajak/ PBB . Apabila Data yang tidak lengkap akan dapat menjadi penghambat dalam penginputan di aplikasi RDKK.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, F., & Adnan, M. F. 2021. Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4) : 1137-1150.
- Azida, I. 2017. *Strategi Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani Di Desa Kalisalak Dan Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, Program Studi Ekonomi Pembangunan.
- Ediwijoyo, S. P., Wahyuningsih, S., & Marlina, W. (2023). Kesejahteraan Petani Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 38-47.
- Huda, S., As'ad M. U., & Kuncoro D. 2021. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Kota Banjarbaru. Tesis*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Iskandar, J. 2006. Metodologi Memahami Petani dan Pertanian. *Jurnal Analisis Sosial*, 171-211.
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023. 2023. Jakarta Ali Jamil.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. 2016. Jakarta Sumarjo Gatot Irianto.
- M. Rachmat. 2020. Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*, hal. 36
- Mashuri., & Nurjannah, D. 2020. Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97-112.
- Nomita, B. P. 2022. *Evaluasi Program Kartu Tani Dalam Mengoptimalkan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah : Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Thesis*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Program Studi Kebijakan Publik.
- Nugraha, Y., Dedi, A., & Munir, S. 2022. Implementasi Program Kartu Tani Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Unigal Repository*, 02(02), 2900-2912.
- Prayitno, H., & Arsyad, L. 1987. *Petani Desa Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BFEE - YK.
- Purnama, S. G. 2015. Panduan Focus Group Discussion (FGD) dan Penerapannya. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana*, 1-15.
- Rahayu, E. A. 2016. Analisis Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2014. *Digital Repository Universitas Jember*, 1-94.
- Riyadh, M. I. 2015. Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan di Sumatera Utara. *dpr. go. id*, 17-32.

- Rosyid, H. A., Nuraeni, L., Trihadi, M. N., Khotimah, W., Huda, W., & Wahidah, I. 2021. Analisis Efektivitas Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani di Lingkungan Cilipung. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(38), 72-92.
- Seksi Kelembagaan Alsintan dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)*. 2018. Provinsi Sulawesi Selatan Asuransi Jasindo.
- Soembodo, B. & Sudarso. 2003. Persepsi Masyarakat Petani Miskin Mengenai Kesejahteraan Keluarga: Studi Komunitas Di Desa Tunggun Jagir, Kec. Mantup, Kab. Lamongan. *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, hal. 89
- Soendari, T. 2012. Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 1-44.